

**KINERJA KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**RATIH YULIA PUTRI
07011381621147**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2018

SKRIPSI

OLEH :
RATIH YULIA PUTRI
07011381621147

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 20 Juli 2020

Pembimbing I

DR. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si

NIP. 196511171990031004

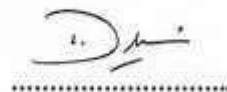


.....

Pembimbing II

DWI MIRANI, S.I.P., M.Si

NIP. 198106082008122002



.....

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 30 Juli 2020.

Palembang, 30 Juli 2020

Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




Anggota

2. Dwi Mirani, S.I.P., M.Si
NIP. 198106082008122002



3. Drs. Gatot Budiarto, M.Si
NIP. 195806091984031002




4. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan. (John Ruskin)

Perencanaan keuangan memberi tahu Anda kemana uang Anda akan digunakan, bukan membuat Anda penasaran kemana uang Anda sudah digunakan.

(Dave Ramsey)

Ucap syukur kepada mu Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan:

Sebagai ungkapan cinta dan rasa terima kasihku yang tulus, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang senantiasa mengiringi langkahku dengan segala restu, dukungan dan doa serta saudara kandungku yang juga selalu membantu dan memberikan dukungan moril yang tiada hentinya.

ABSTRACT

Financial Performance In The Department Of Energy And Mineral Resources In The Province Of South Sumatra In 2018

This study aims to determine the level of financial performance of the Department of Energy and Mineral Resources of South Sumatra Province in 2018 using the perspective of value for money, value for money is an organizational management concept that is based on three main criteria, namely economy, efficiency and effectiveness. This research is a descriptive study with the object of research is the realization of southern financial achievement data contained in the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) Department of Energy and Mineral Resources in South Sumatra Province in 2018. The data collection method used is documentation study, and supported with interviews. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis on economic, efficiency and effectiveness measurements. Based on the results of a study of the financial performance of the Department of Energy and Mineral Resources in South Sumatra Province in 2018, it showed an economical, very efficient and effective level of performance. To get optimal results at the Department of Energy and Mineral Resources, it is necessary to make an economical, efficient and effective plan, for that the thing that must be done is to improve the competence of human resources by following or observing price fluctuations in the market, equalizing qualifications according to what has been become an agency rule, and minimize spending on each program every year.

Keywords: value for money, economy, efficiency, and effectiveness.

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Advisor II



Dwi Mirani, S.I.P., M.Si

NIP. 198106082008122002

Palembang, 30 July 2020

Chairman Of The State Administration Science Department

Faculty Of Social Science And Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018”.

Peneliti menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya pihak-pihak pendukung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan restu, doa, semangat serta dukungan yang tiadahentinya.
2. Saudara kandung penulis yang juga memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Pembimbing Akademik
5. Ibu Ermanvida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si selaku Pembimbing Skripsi I dan ibu Dwi Mirani, S.I.P., M.Si selaku Pembimbing Skripsi II
7. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
8. Seluruh staf dan admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik
9. Bapak Brilliant Faisal, S.Pi., M.Si selaku Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
10. Ibu Herna Nely, SE., MM selaku Kepala Bagian Keuangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
11. Seluruh staf dibagian Keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
12. Teman-teman satu seperjuangan SMANTI Palembang dan teman satu angkatan Ilmu Administrasi Publik 2016 Kampus Palembang

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus menambah wawasan kepada para pembaca mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan dilihat dari perspektif *value for money* pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 03 Juli 2020

Ratih Yulia Putri
NIM.07011381621147

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Kinerja Keuangan	8
2. Pengukuran Kinerja Pemerintah	10
3. Karakteristik Indikator Kinerja.....	11
4. Konsep Value For Money	12
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Definisi Konsep.....	24
C. Fokus Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Informan Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan	29

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel.....	31
1. Sejarah Singkat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	31
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Energi Dan SumberDaya Mineral.....	33
3. Visi Dan Misi Dinas Energi Dan SumberDaya Mineral.....	33
4. Struktur Organisasi Dinas Energi Dan Sumber DayaMineralProvinsi	35
5. Tugas dan Fungsi Bidang	38
6. Sumber Daya Manusia Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Sub Bagian Keuangan.....	43
B. Kinerja Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Dilihat Dari Perspektif <i>ValueForMoney</i>	45
a. Analisis Ekonomi(<i>Input</i>).....	45
b. Analisis Efisiensi(<i>Output</i>)	55
c. Analisis Efektivitas(<i>Outcome</i>).....	58
BABV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Tahun 2018	5
Tabel 2. Kriteria Pengukuran Value For Money	18
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4. Fokus penelitian	25
Tabel 5. Jumlah Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Sub Bagian Keuangan	44
Tabel 6. Anggaran Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	47
Tabel 7. Anggaran Dan Realisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	47
Tabel 8. Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49
Tabel 9. Realisasi program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	49
Tabel 10. Realisasi Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	50
Tabel 11. Realisasi Program Pengusahaan Pertambangan Dan Peningkatan Produksi Batubara	51
Tabel 12. Realisasi Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Geologi ESDM	52
Tabel 13. Realisasi Program Pemanfaatan Dan Pengusahaan Migas	52
Tabel 14. Realisasi Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Untuk Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat	53
Tabel 15. Realisasi Total Belanja Untuk Memperoleh Pendapatan	56
Tabel 16. Realisasi Total Pendapatan	57
Tabel 17. Hasil Ukuran Efisiensi	58
Tabel 18. Program Dan Kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	59
Tabel 19. Pencapaian Target Kinerja Per Program Dan Per Kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Elemen Value For Money.....	17
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 3. Struktur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	37
Gambar 4. Laporan Keuangan Tahun 2018 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	73
Lampiran 2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2018.....	75
Lampiran 3. Ringkasan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan TA 2018	77
Lampiran 4. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2017.....	79
Lampiran 5. Surat Penunjukkan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi	81
Lampiran 6. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi	82
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing 1.....	83
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II.....	84
Lampiran 9. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji 1	85
Lampiran 10. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II	86
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.....	87
Lampiran 12. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	88
Lampiran 13. Kartu Bimbingan Pembimbing II	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Instansi pemerintah merupakan salah satu unsur dalam aparatur negara yang berkaitan dengan pemerintahan, instansi pemerintah itu sendiri merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat terhadap pemerintah dalam membangun yang sesuai dengan bidangnya. Instansi pemerintah salah satu sumber penting dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional (*good governance*). Berhasil atau tidaknya instansi pemerintah tersebut dalam menyukseskan dan mewujudkan pembangunan nasional didukung pula oleh beberapa faktor penting, diantaranya kinerja instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah menjadikan kinerja sebagai perhatian utama untuk mencapai kinerja yang baik.

Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak ingin dicapai. Untuk menilai sukses tidaknya suatu instansi pemerintah dalam mencapainya suatu tujuan dan sasaraannya diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang akan digunakan, berhubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah membawa perubahan dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Khususnya masalah penganggaran, didukung pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kaitan dengan anggaran daerah, peraturan pemerintah ini telah menyiratkan adanya arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada publik. Hal ini sangat jelas tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa anggaran daerah berdasarkan anggaran kinerja. Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana pemerintah melaksanakan dan melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, ekonomi, efektif, bertanggung jawab, serta dasar dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, yang salah satunya adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Bagian Kedua Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan

Indikator-indikator diatas menunjukkan bahwasanya pengelolaan keuangan daerah yang dimana pemerintah melaksanakan dan melakukan pengelolaan keuangan

daerah harus tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, ekonomi, efektif, bertanggung jawab, adil. Dasar dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, yang salah satunya adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Konsep penganggaran berbasis kinerja menuntut dilakukannya keterkaitan anggaran dan kinerja, dan juga digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, serta menjadi manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan daerah. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan (Nordawan dan Hertianti, 2010: 25).

Hasil akhir atas penilaian kinerja adalah capaian-capaian kinerja yang diformulasikan dalam bentuk ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Sehingga munculnya tuntutan baru hasil dari pengukuran kinerja tersebut harusla dilaporkan dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja, dan untuk mengukur penyerapan anggaran tersebut berjalan dengan baik atau tidak maka memerlukan perhitungan anggaran yaitu salah satunya menggunakan metode *VFM (Value For Money)*, Mardiasmo (2009:34) menyatakan *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen pertama yaitu ekonomi, efisien dan efektifitas, dan juga Mardiasmo (2005:131) mengatakan bahwa *value for money* dapat digunakan sebagai inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah daerah, dimana pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian kepada pertanyaan mengenai ekonomi, efisien, efektivitas program dan kegiatan dalam penelitian ini difokuskan pada kinerja keuangan, karena hal tersebut merupakan bagian terpenting dalam pengukuran kinerja pemerintah, begitu pun juga berlaku pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2018 berikut merupakan

anggaran Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, dan dari tabel 1 dapat dilihat bagaimana porsi anggaran dalam pelaksanaan program-program yang ada pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tabel 1.mengenai laporan rekapitulasi realisasi pengawasan anggaran definitif per kegiatan terlihat perbandingan antara pagu anggaran dan jumlah realisasi serta sisa anggaran pada tahun anggaran 2018 masih terdapat beberapa bidang dana anggaran definitif per kegiatan yang belum terserap secara maksimal. Ada tujuh program yang termasuk ke dalam anggaran definitif per kegiatan yakni program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pengusahaan pertambangan dan peningkatan produksi batubara, program pengembangan dan pemanfaatan geologi ESDM, program pemanfaatan dan pengusahaan migas, program pengembangan dan pemanfaatan energi baru untuk kebutuhan listrik bagi masyarakat. Persentase penyerapan anggaran definitif per kegiatan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 yakni program pelayanan administrasi perkantoran 98,82 %,program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 99,17 %, program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 94,55 %, program pengusahaan pertambangan dan peningkatan produksi batubara 77,02%, program pengembangan dan pemanfaatan geologi ESDM 85,46%, program pemanfaatan dan pengusahaan migas 95,82%, program pengembangan dan pemanfaatan energi baru untuk kebutuhan listrik bagi masyarakat 64,33%.

Tabel 1. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Tahun 2018

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi					Sisa anggaran
			Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal	Total	%	
3.05.01.0 1.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.556.325.000.00	31.700.000.00	2.494.339.961.00	0,00	2.526.039.961,00	98,82	30.285.039.00
3.05.01.0 1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	455.000.000.00	0,00	451.207.535.00	0,00	451.207.535,00	99,17	3.792.465.00
3.05.01.0 1.6	Program peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan	50.000.000.00	0.00	47.275.000.00	0,00	47.275.000.00	94,55	2.725.000.00
3.05.01.0 1.18	Program pengusahaan pertambangan dan peningkatan produksi batubara	500.000.000.00	0.00	385.107.185.00	0,00	385.107.185.00	77,02	114.892.815.00
01.01.19	Program pengembangan dan pemanfaatangeologi ESDM	75.000.000.00	0.00	64.095.000.00	0,00	64.095.000.00	85,46	10.905.000.00
01.01.20	Program pemanfaatan dan pengusahaan migas	75.000.000.00	0.00	71.862.498.00	0,00	71.862.498.00	95,82	3.317.502.00
01.01.21	Program pengembangan dan pemanfaatanenergy baru untuk kebutuhan listrik bagimasyarakat	175.000.000.00	0.00	112.579.718.00	0,00	112.579..718.00	64,33	62.420.282.00
JUMLAH		3.886.325.000.00	31.700.000.00	3.626.466.987.00	0,00	3.658.166.897.00	94,13	228.158.103.00

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Laurensius dan Abdul Halim (2005:774)), dan juga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan skema strategis Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu. Periode yang menjadi penilaian kinerja adalah periode yang berakhir untuk dua tahun berakhir. Dimensi variabel kinerja pemerintah daerah adalah:

- a. Ekonomi (*Economy*)
- b. Efisiensi (*Effisiensi*)
- c. Efektifitas (*Effectivenees*)

Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai dan mengontrol organisasi dalam menghasilkan yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah terkait. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja dari sisi keuangan sangat perlu untuk dilakukan karena menyangkut pengelolaan keuangan masyarakat yang pada dasarnya ditujukan untuk mensejahterakan rakyat.

Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provisnsi Sumatera Selatan sudah efisien, efektivitas dan ekonomis, maka perlu

diukur dan diteliti lebih lanjut kinerja keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Tingkat Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari perspektif *value for money* tahun 2018?”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2018 dilihat dari perspektif *value for money*.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis yakni sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya keuangan negara dan fiskal mengenai kinerja keuangan pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada pembuat kebijakan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat lebih efektif dalam peningkatan kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim Dan Syam, Kususfi. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
- Bastian, Indra. (2005) Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Bastian, Indra 2006. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta : BPFE
- Deddi, Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo.2002a. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo.2002b. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo.2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo.2004. Bunga Rampai: Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo.2006. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
- Mahmudi. 2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun.2006. Penelitian Kinerja Sektor Public. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Mahoney. Et Al. 1963. Development Of Managerial Performance: A Research Approach. Cincinnati: South Western Publishing
- S. Munawir (2002). Analisis Informasi Keuangan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty Yogya
- Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suyadi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta
- Suparmoko, 2016. Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. ALFABETA, Bandung

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi :Dilengkapi Dengan Metode R&D*, Bandung: Alfabeta

Peraturan Pemerintah/Undang-Undang/Regulasi:

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat DanDaerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuanagan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 293 Dan 330

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Asas Penyelenggaran Pemerintah

Sumber lain:

Rahmawati, Monika. 2011. Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011 Di SD Negeri 01 Kota Prabumulih Dilihat Dari Perspektif *Value For Money*.

Adhitia, Reza. 2011. Analisis Penerapan *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Maparepa. 2014. Dimensi Efisiensi Dan Ekonomis Dalam Penerapan *Value For Money* Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Tahun 2008-2013.

Novella, Tiara. 2019. Kinerja Anggaran Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang Dilihat Dari Perspektif *Value For Money*.

Sartono, Ali. 2018, Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep *Value For Money*.

Purwiyanti, Dwi 2019. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Dinggala Kodi.

Laurensius, Ferry And, Abdul Halim. 2005. Pengaruh Factor-Faktor Rasional, Politik Dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Tesis

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017.